



PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH, TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Nur Ade Noviyanti[✉], Kiswanto

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Januari 2016
Disetujui Februari 2016
Dipublikasikan Maret 2016

Keywords:

Audit Findings; Level Dependence On Centre; Local Government Financial Performance; Regional Wealth Level; Size of Legislature.

Abstrak

Tujuan dari studi ini adalah untuk menentukan karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit dari badan pengawas keuangan pada kinerja keuangan dari pemerintah daerah di daerah distrik/kecamatan di Indonesia. Populasi yang di ambil dalam studi ini adalah daerah perkotaan pada tahun 2011 sampai 2013. Penelitian ini menggunakan sample purposive pada 43 populasi dan 129 unit analisis. Alat analisis dalam penelitian menggunakan SPSS 21 menggunakan regresi multiple analisis dan tes asumsi klasik. Berdasarkan hasil dari penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa level variabel dependen terpusat dan pembiayaan regional memberikan efek positif. Pengukuran dari legislature memberikan efek negatif dan signifikan pada kinerja dari keuangan pemerintahan daerah. Ukuran dari pemerintahan daerah, tingkat dari kekayaan daerah, penemuan audit tidak memberikan efek pada kinerja keuangan daerah. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah menggunakan penemuan nilai proxy dan penemuan kategoris akan lebih tepat dalam menemukan materi dalam penemuan.

Abstract

The purpose of this study was to determine the characteristics of the local government and BPK audit findings on the financial performance of local government districts / municipalities in Indonesia. The population in this study was the district / city governments in Indonesia in 2011-2013. This study using purposive sampling with 43 population and 129 units of analysis. Analyses tool uses SPSS 21 multiple regression analyses complying classical assumption test. Based on the results of this study concluded that the variable level of dependence on the central and regional budget is gave a positive effect. The size of the legislature gave a negative effect and significant on the financial performance of local governments. The size of the local government, the level of regional wealth, the audit findings do not affect the government's financial performance. The recommendation for further research is The use of proxy values the findings and the findings would be more appropriate categories in determining the level of materiality of a finding

© 2016 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:

Gedung C6 Lantai 2 FE Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: fe@unnes.ac.id

PENDAHULUAN

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah maka pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan undang-undang. Undang-undang otonomi daerah memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Diberlakukannya otonomi daerah memiliki fungsi agar setiap daerah akan lebih maju, mandiri, sejahtera dan dapat melaksanakan pemerintah daerah agar mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam mencapai pemerintahan yang baik. Pasal 4 PP No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan tanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. Pengukuran kinerja dalam pemerintah daerah dikenal 2 macam, yaitu kinerja keuangan dan kinerja non keuangan (Mahsun, 2006). Kinerja keuangan adalah kinerja yang dinilai berdasarkan ukuran angka dalam satuan nilai uang. Kinerja non keuangan dinilai tidak berdasarkan ukuran angka dalam satuan nilai uang. Pemerintah daerah sebagai pihak agen dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat sebagai pihak principal maka pemda harus meningkatkan kinerja keuangannya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas, efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah. Berdasarkan Struktur APBD Kabupaten dan Kota TA 2012 secara kumulatif, total pendapatan daerah Kabupaten sebesar Rp 321,67 triliun dan belanja yang lebih besar yaitu mencapai Rp 345,17

triliun maka total defisit di Kabupaten mencapai Rp 23,5triliun. Demikian pula di Kota, dengan total pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp 81,96 triliun dan alokasi belanja sebesar Rp 86,58 triliun maka akan terjadi defisit anggaran sebesar Rp 4,62 triliun. Defisit pada Kabupaten sebesar Rp 23,5 triliun tersebut dibiayai dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu dan komponen-komponen pembiayaan lainnya sebesar Rp23,87 triliun sehingga akan terjadi SiLPA TA berjalan sebesar Rp 369,4 miliar. Sementara itu, pembiayaan untuk defisit anggaran di Kota sebesar Rp 4,69 triliun sehingga akan terjadi SiLPA tahun anggaran berjalan sebesar Rp 72,7 miliar pada Kota.

Kinerja keuangan daerah juga dilihat dari hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil laporan keuangan pemerintah daerah harus di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menguji kelayakan dari laporan keuangan tersebut. Berdasarkan hasil opini laporan keuangan pemerintah daerah dari tahun 2008-2012 menunjukkan dari tahun 2008-2012 masih sedikit pemerintah daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Masih banyaknya pemerintah daerah yang mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) oleh BPK.

Karakteristik pemerintah daerah dalam penelitian ini dijelaskan dengan variabel ukuran pemerintah daerah karena variabel ukuran pemerintah daerah sering digunakan untuk menjelaskan karakteristik dari perusahaan sektor privat. Maka untuk variabel ukuran pemerintah daerah dianggap mampu menjelaskan karakteristik dari pemerintah daerah. Variabel ukuran pemerintah daerah di ukur dengan menggunakan total aset dalam neraca. Terdapat beberapa penelitian yang menganalisis mengenai faktor-faktor yang menjadi penentu kinerja keuangan pemerintah daerah. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun pada

penelitian Surepno (2013) dibuktikan secara empiris bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan Marfiana (2013) melakukan penelitian menggunakan variabel tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang diukur menggunakan dana alokasi umum di banding dengan total pendapatan daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel Belanja daerah dan ukuran legislatif masih jarang digunakan untuk penelitian tentang kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga peneliti menggunakan variabel belanja daerah dan ukuran legislatif dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Peneliti menggunakan variabel hasil pemeriksaan audit BPK dalam mengukur keterkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut diperlukan untuk menghindari adanya berbagai macam tindak kecurangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Berdasarkan kondisi tersebut membuat peneliti tertarik dan penting untuk menganalisis lebih lanjut karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Penelitian ini juga untuk memberikan jawaban atas perbedaan hasil penelitian terdahulu.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Konteks sektor publik bahwa pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pernyataan ini mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan

(teori keagenan) antara masyarakat sebagai principal dan pemerintah daerah sebagai agent.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pada rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang laporan keuangan pemerintah pusat-daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai kinerja entitas pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh pengguna anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Bastian (2006) mendefinisikan kinerja sebagai gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Ukuran pemerintah daerah untuk mengetahui besar kecilnya obyek dari pemerintah daerah tersebut. Mengetahui ukuran pemerintah daerah salah satunya dengan mengetahui total aset pemerintah daerah. Daerah yang memiliki ukuran daerah atau total aset yang lebih besar akan memberikan keuntungan berupa kemudahan dalam kegiatan operasional sehingga pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan maksimal. Menguji hubungan ukuran pemerintah daerah dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, maka peneliti menduga bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah maka akan semakin baik kinerja keuangan daerah dan juga sebaliknya. Penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardani (2012) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tingkat kekayaan daerah dicerminkan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Jumlah kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintah daerah. Menguji hubungan tingkat kekayaan daerah dengan kinerja keuangan pemerintah daerah,

maka peneliti menduga bahwa semakin tinggi tingkat kekayaan daerah maka akan semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah dan juga sebaliknya. Semakin rendah tingkat kekayaan daerah maka akan semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian surepno (2013) dan indrawan (2013) menyatakan tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dapat dilihat dari penerimaan Dana Alokasi Umum. Undang-undang No 33 Tahun 2004, DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah pusat akan memantau pelaksanaan alokasi DAU sehingga dapat memacu pemerintah daerah agar meningkatkan kinerja keuangannya. Menguji hubungan tingkat ketergantungan pada pusat dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, maka peneliti menduga bahwa semakin tinggi tingkat ketergantungan pada pusat maka akan semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh sumarjo (2010) dan marfiana (2012) menyatakan tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ukuran legislatif dalam penelitian ini ditunjukkan dengan jumlah anggota legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Indonesia. Lembaga legislatif atau DPRD merupakan lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah. Dilihat dari keuangan daerah maka menunjukkan kinerja pemerintah daerah tersebut. Banyaknya jumlah anggota DPRD diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah. Semakin besar jumlah anggota legislatif diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui adanya pengawasan. Kusumawardani

(2012) dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah yang diawasi sangat baik salah satunya dari lembaga legislatif akan menghasilkan kinerja yang baik.

Temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketidak patuhan terhadap ketentuan perundang-undangan ini dapat mengakibatkan kerugian daerah, ketidak efisienan. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah menggambarkan semakin buruknya kinerja pemerintah daerah tersebut. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Marfiana (2012) variabel temuan audit BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

H₁ :Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H₂ :Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H₃ :Tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

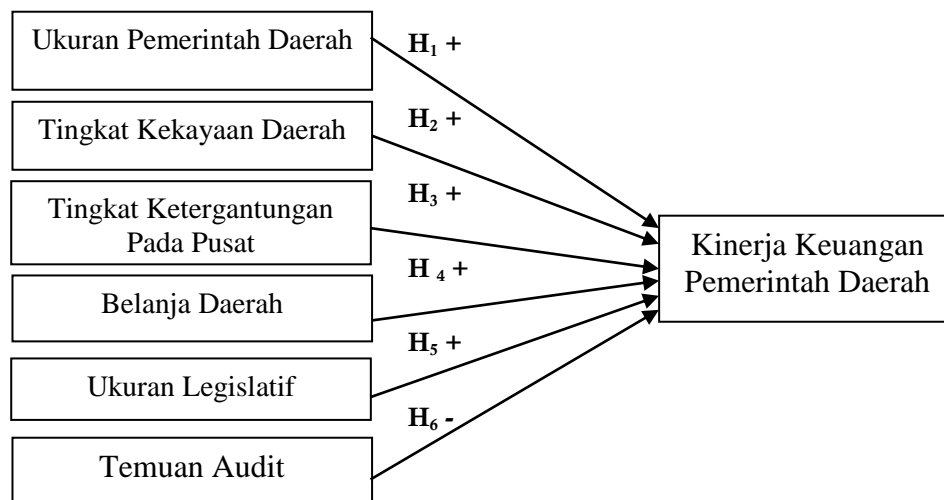
H₄ :Belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H₅ :Ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H₆ :Temuan audit BPK berpengaruh negaatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, kerangka berpikir dari penelitian ini digambarkan pada Gambar di bawah ini:

Usulan Kerangka Berpikir



METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun

2011-2013. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. Kriteria pengambilan sampel disajikan pada tabel 1.

Tabel 1
Populasi dan Sampel

No	Identifikasi	Jumlah Pemerintah Daerah
1	Pemerintah daerah yang telah diaudit BPK	490
2	Pemerintah daerah yang telah di audit BPK yang tidak memiliki LKPD secara lengkap	(0)
3	Pemerintah daerah yang tidak mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian secara berturut-turut tahun 2011-2013.	(447)
4	Jumlah pemerintah daerah yang digunakan sebagai sampel	43
5	Jumlah tahun penelitian	3
	Jumlah unit analisis	129

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015

Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah. Terdapat enam variabel independen dalam penelitian ini yaitu ukuran pemerintah daerah,

tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, belanja daerah, ukuran legislatif, temuan audit. Penjelasan mengenai definisi operasional dan pengukuran dari masing-masing variabel akan dijelaskan pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2
Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi	Skala	Pengukuran	Sumber
1	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,tujuan,misi dan visi organisasi	Rasio	<u>Output</u> Input	Bastian (2006)
2	Ukuran Pemerintah Daerah (X ₁)	Ukuran pemerintah daerah menunjukkan besar/kecilnya suatu objek	Nominal	Total aset dalam neraca pemerintah daerah	Sumarjo (2010)
3	Tingkat Kekayaan Daerah (X ₂)	Tingkat kekayaan daerah yang diukur melalui nilai PAD	Nominal	<u>Pendapatan Asli Daerah</u> Total Pendapatan Daerah	Kusumawardani (2012)
4	Tingkat Ketergantungan pada Pusat (X ₃)	Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat diukur melalui nilai DAU	Nominal	<u>Dana Alokasi Umum</u> Total Pendapatan Daerah	Marfiana (2013)
5	Belanja Daerah (X ₄)	semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih	Nominal	Total Realisasi Belanja Daerah	Marfiana (2013)
6	Ukuran Legislatif (X ₅)	lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah daerah sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah	Nominal	Jumlah Anggota DPRD	Kusumawardani (2012)
7	Temuan Audit (X ₆)	kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Nominal	Jumlah Temuan Audit	Marfiana (2013)

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2015

Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, Uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Setelah itu, dilakukan analisis regresi berganda

dan uji hipotesis yaitu uji F, uji t dan juga uji koefisien determinasi. Hasil dari data penelitian menunjukkan bahwa data penelitian normal dan bebas dari multikolinearitas dan bebas dari heteroskedastisitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-

variabel penelitian. Pengukuran yang digunakan mencakup nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Hasil analisis statistik deskriptif dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SIZE	129	333647755631,73	24793716376864,60	3376968870325,104	3756967180651,31150
TKD	129	,01	,38	,1188	,09125
TKPP	129	,02	,75	,5308	,12904
BD	129	355460934019,00	3277526096684,00	1098434293323,7919	642660187525,71910
UL	129	25,00	50,00	38,2558	10,14834
TA	129	4,00	35,00	14,4341	5,94617
R_EFISIENSI	129	,83	1,11	,9724	,05117
Valid N (listwise)	129				

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 4. Uji Statistik F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	A
1	Regression	,057	6	,009	4,166	,001 ^b	0,05
	Residual	,278	122	,002			
	Total	,335	128				

Sumber: *Output* SPSS 21, 2015

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa untuk model yang pertama menunjukkan nilai F hitung sebesar 4,166 dan nilai signifikansi 0,001. Hal ini berarti tingkat signifikansi < 5% ($\alpha=0,05$). Variabel dalam penelitian ini dapat

disimpulkan bahwa model penelitiannya layak atau bisa diterima.

Hasil uji statistik t dapat dijelaskan berdasarkan tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5. Uji Statistik t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Kesimpulan
		B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	,937	,035		26,606	,000	
	SIZE	-1,010E-013	,000	-,075	-,510	,611	H ₁ = Ditolak
	TKD	-,044	,078	-,078	-,561	,576	H ₂ = Ditolak
	TKPP	,135	,044	,339	3,056	,003	H ₃ = Diterima
	BD	1,638E-013	,000	,802	3,739	,000	H ₄ = Diterima
	UL	-,002	,001	-,483	-3,542	,001	H ₂ = Ditolak
	TA	,000	,001	-,039	-,443	,659	H ₂ = Ditolak

Sumber: *Output* SPSS 21, 2015

Uji parsial t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variable dependen. Tabel 5 menunjukkan hipotesis pertama Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki nilai signifikansi $0,611 > 0,05$ sehingga **H₁ ditolak**. Berdasarkan hasil pengujian dari hipotesis pertama menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Karena kenaikan atau penurunan ukuran pemerintah daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian mengindikasikan bahwa peran total aset dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia belum dapat berfungsi sebagai mana mestinya. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marfiana (2013) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah yang diprosikan dengan total aset tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010), Kusumawardani (2012), Indrawan (2013), Surepno (2013) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hipotesis kedua Pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki nilai signifikansi $-0,576 > 0,05$ sehingga **H₂ ditolak**. Berdasarkan hasil pengujian dari hipotesis kedua menyatakan bahwa tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Adanya hubungan negatif dan tidak signifikan antara tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan semakin mandiri pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga tingkat ketergantungan kepada pihak eksternal menjadi rendah. Hal inilah yang membuat pemerintah daerah tidak termotivasi untuk meningkatkan kinerja keuangannya karena rendahnya tuntutan dari pihak eksternal. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010), Kusumawardani (2012) dan Marfiana (2013) yang menyatakan bahwa tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indrawan (2013) dan Surepno (2013) menyatakan bahwa tingkat kekayaan daerah

berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hipotesis ketiga Pengaruh tingkat ketergantungan pada pusat terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki nilai signifikansi $0,003 < 0,05$ sehingga **H₃ diterima**. Berdasarkan hasil pengujian dari hipotesis ketiga menyatakan bahwa tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat maka semakin tinggi pula tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Marfiana (2013) yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hipotesis keempat Pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga **H₄ diterima**. Berdasarkan hasil pengujian dari hipotesis keempat menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Banyaknya belanja yang dikeluarkan oleh suatu daerah dapat mempermudah pemerintah daerah tersebut untuk menjalankan program pembangunan yang telah dirancang di daerahnya. Pengelolaan belanja daerah dengan efisien dan tepat akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Marfiana (2013) yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa anggaran belanja daerah pemerintah daerah sudah direalisasikan untuk penggunaan perbaikan kinerja yang lebih baik.

Hipotesis kelima Pengaruh ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki nilai signifikansi $0,001 < 0,05$, akan tetapi koefisien bernilai negatif sehingga **H₅ ditolak**. Berdasarkan hasil pengujian dari hipotesis kelima menyatakan bahwa ukuran legislatif berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian mengindikasikan bahwa banyaknya

jumlah anggota DPRD belum tentu dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Bahkan malah semakin menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Peran yang diharapkan pada anggota DPRD dalam kaitannya dengan kinerja yaitu dalam hal pengawasan pelaksanaan kinerja oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Seharusnya DPRD diharapkan dapat lebih sensitif dan aktif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat mengingat mereka pun terpilih menjadi anggota DPRD karena pilihan masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Marfiana (2013) yang menyatakan bahwa ukuran legislatif berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Sumarjo (2010) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hipotesis keenam Pengaruh temuan audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki nilai signifikansi $0,659 > 0,05$ sehingga **H₆ ditolak**. Berdasarkan hasil pengujian dari hipotesis keenam menyatakan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang mendapatkan jumlah temuan audit yang banyak belum tentu memiliki kinerja keuangan pemerintah daerah yang buruk. Pemerintah daerah dalam menjalankan kinerja keuangannya kurang dipengaruhi oleh hasil dari temuan audit. Pelaksanaan revisi maupun kritik saran dari BPK hanya sebatas pemenuhan kewajiban tanpa adanya tindak lanjut dari pemerintah daerah untuk melakukan kinerja keuangan dengan baik. Jumlah temuan audit sedikit, maka kinerja keuangan pemerintah daerah yang dilakukan baik dari pada daerah yang memiliki jumlah temuan audit banyak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Marfiana (2013) yang menyatakan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

SIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan pada pusat, belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Ukuran legislatif berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan diatas, maka saran dalam penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pada pusat dan sbelanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga diharapkan dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat digunakan dengan baik agar terciptanya pembangunan kegiatan ekonomi daerah sehingga meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Penelitian selanjutnya disarankan dapat menggunakan variabel independen lain yang diduga memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Misalnya jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan opini audit. Penggunaan proksi nilai temuan dan kategori temuan akan lebih tepat dalam menentukan tingkat materialitas suatu temuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta : BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta : BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2013*. <http://bpk.go.id> . Diakses pada tanggal 2 Maret 2015.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta : BPK RI.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2012. *Profil APBD TA 2012*. <http://dipk.depkeu.go.id>. Diakses pada tanggal 26 Februari 2015.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indrawan, M Yusuf. 2013. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten/kota se provinsi sulawesi selatan*. Skripsi. Fe Universitas Hasanudin.
- Kusumawardani.2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*. Volume 1 (1).
- Marfiana, Nandhya dan Lulus Kurniasih. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *E-Jurnal Ekonomi Universitas Sebelas Maret*. Volume 1 (1)
- Mohamad, Mahsun. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE UGM Yogyakarta.
- Sumarjo, Hendro. 2010. *Pengaruh karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Surepno. 2013. *Pengaruh Retuen on Equity (ROE), Ukuran (Size), dan Kemakmuran (Wealth) Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Di Indonesia* . Skripsi. Semarang : Fakultas Ekonomi Unnes.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 4 PP No. 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.